

**PENGARUH IMPLEMENTASI SISTEM AKUNTANSI DAN PENGELOLAAN  
KEUANGAN DAERAH TERHADAP KINERJA PEMERINTAH DAERAH  
(STUDI PADA PEMERINTAH KOTA PALOPO)**

**Nur Shakila Ramadhani<sup>1</sup>**

**Fakultas Ekonomi Dan Bisnis, Program Studi Akuntansi,**

**Universitas Muhammadiyah Palopo**

**[Nurshakilaramadhani1299@gmail.com](mailto:Nurshakilaramadhani1299@gmail.com)**

**ABSTRAK**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh implementasi sistem akuntansi, pengelolaan keuangan daerah terhadap kinerja pemerintah daerah. Populasi dan sampel penelitian ini adalah pegawai yang bekerja pada Kantor Bapenda kota palopo. Jenis data penelitian ini menggunakan data primer berupa kuesioner. Analisis data menggunakan analisis regresi linear berganda menggunakan *Statistical Packages for Social Science* (SPSS). Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi sistem akuntansi dan pengelolaan keuangan daerah berpengaruh positif dan signifikan dalam kinerja pemerintah daerah.

**Kata Kunci:** implementasi sistem akuntansi, pengelolaan keuangan daerah, kinerja pemerintah daerah.

**ABSTRACT**

*This study aims to determine and analyze the effect of the application of accounting systems, regional financial management on the performance of local governments. The population and sample of this research are employees who work in the office of Bapenda Palopo city. This type of research data uses primary data in the form of a questionnaire. Data analysis used multiple linear regression analysis using Statistical Packages for Social Science (SPSS). The results showed that the implementation of the accounting system and regional financial management had a positive and significant effect on the performance of local governments.*

**Keywords:** *accounting system implementation, regional financial management, local government performance.*

## PENDAHULUAN

Implementasi akuntansi pemerintahan daerah diawali pada tahun 2007 setelah diterbitkan peraturan pemerintah nomor 24 tahun 2005 tentang standar akuntansi pemerintahan dan peraturan menteri dalam negeri nomor 13 tahun 2006 tentang pedoman pengelolaan keuangan daerah. Serta diperkuat dengan peraturan pemerintah nomor 56 tahun 2005 tentang sistem akuntansi keuangan daerah menyatakan dalam mengelola keuangan daerah maka setiap pemerintah berkewajiban untuk memanfaatkan teknologi yang ada guna meningkatkan keuangan daerah dan mendistribusikannya untuk pelayanan publik.

Menurut Mazmanian dan Sabatier dalam Wahab (2004), implementasi adalah pelaksanaan keputusan kebijakan dasar, biasanya dalam bentuk undang-undang, namun dapat pula berbentuk perintah-perintah atau keputusan-keputusan eksekutif

yang penting atau keputusan badan peradilan.

Pada umumnya tujuan pemanfaatan sistem informasi dan teknologi informasi pada instansi pemerintah lebih menekankan pada tingkat pengurangan kesalahan dalam memproses transaksi yang selama ini dilakukan secara manual dan memberikan informasi laporan keuangan yang akurat dan tepat waktu yang dapat digunakan oleh manajemen untuk membuat keputusan, sehingga memberikan dampak yang luar biasa mengingat instansi pemerintah merupakan sektor publik yang paling tingkat tinggi ketergantungannya pada aktivitas-aktivitas pengumpulan dan pemrosesan. (Nurfasa 2017).

Kualitas sistem informasi akuntansi yang berkualitas dihasilkan oleh sistem informasi yang mengoptimalkan operasi sistem akuntansinya, karena sistem informasi akuntansi yang berkualitas akan dijadikan manager dalam

pengambilan keputusan, perencanaan, dan pengendalian. Untuk mendapatkan informasi yang berkualitas perlu adanya sebuah sistem yang mengolah data menjadi sebuah informasi yang berharga yang mana dituntut adanya informasi yang cepat, tepat dan akurat sehingga mengakibatkan persaingan yang semakin kompetitif (Rizka 2019).

Disamping sistem akuntansi, faktor yang mempengaruhi kinerja keuangan pemerintah daerah yaitu pengelolaan keuangan daerah yang berorientasi pada kinerja menunjukkan adanya akuntabilitas kinerja yang terdapat keterkaitan antara sasaran strategis yang ingin dicapai dengan jumlah dana yang dialokasikan maka dapat diasumsikan bahwa pengelolaan keuangan daerah yang baik mempunyai pengaruh terhadap kinerja suatu instansi atau organisasi. Pengelolaan keuangan yang baik akan menciptakan laporan keuangan yang baik pula, hal ini dapat mengindikasikan kinerja yang baik pula pada suatu instansi atau organisasi.

Pengelolaan keuangan daerah harus transparansi yang mulai dari proses perencanaan, penyusunan, dan pelaksanaan anggaran daerah. Selain itu, akuntabilitas dalam pertanggungjawaban publik juga diperlukan, dalam arti bahwa proses penganggaran mulai dari perencanaan, penyusunan, dan pelaksanaan harus benar-benar dapat dilaporkan dan dipertanggungjawabkan kepada DPRD dan masyarakat (Saifanur 2020).

Dengan pelaksanaan otonomi daerah Kabupaten dan Kota, pengelolaan keuangan sepenuhnya berada ditangan pemerintah daerah. Oleh karena itu, pengelolaan keuangan daerah yang baik diperlukan untuk mengelola dana desentralisasi secara transparan, ekonomis, efisien, efektif, dan dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat. Unsur yang paling penting dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di daerah adalah cara pengelolaan keuangan daerah secara berdaya

guna dan berhasilguna. Hal tersebut diharapkan agar sesuai dengan aspirasi pembangunan dan tuntutan masyarakat yang semakin berkembang akhir-akhir ini. Dilihat dari aspek masyarakat dengan adanya peningkatan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat yang semakin baik maka dapat meningkatnya tuntutan masyarakat akan pemerintah yang baik, hal ini menjadi tantangan tersendiri bagi pemerintah untuk bekerja secara lebih efisien dan efektif terutama dalam menyediakan layanan prima bagi seluruh masyarakat. (Novelya 2016).

Kinerja pemerintahan daerah dengan sendirinya merupakan seluruh capaian/hasil-hasil selama pelaksanaan otonomi daerah untuk mencapai tingkat kinerja seperti yang diharapkan tentunya perlu dirumuskan rencana kinerja yang memuat penjabaran sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam rencana strategi pemerintah daerah. Berdasarkan rencana strategi tersebut maka dapat diukur sejauh mana pemerintah daerah

telah mampu mencapai sasaran/target (kinerja) yang telah diterapkan baik dengan indikator kuantitatif maupun kualitatif. kinerja dapat digambarkan sebagai fungsi proses dari respon individu terhadap ukuran kinerja yang diharapkan organisasi, yang mencakup desain kerja, proses pemberdayaan, dan pembangunan dari sisi individu itu sendiri yang mencakup keterampilan, kemampuan dan pengetahuan. kinerja merupakan hasil dari suatu proses perpaduan kapabilitas individu dengan sikap individu terhadap aspek pekerjaan dan organisasi (Chici 2017).

## **TINJAUAN PUSTAKA**

### **2.1 Landasan Teori**

#### **2.1.1 Teori Agensi**

Jensen dan Mecking (1976) bahwa teori agensi menggambarkan hubungan keagenan sebagai hubungan yang timbul karena adanya kontrak yang ditetapkan oleh *principal* (rakyat) yang menggunakan *agent* (pemerintah) untuk melakukan atau

menyediakan jasa yang menjadi kepentingan rakyat. agar hubungan kontraktual ini dapat berjalan dengan lancar, rakyat mendelegasikan otoritas pembuatan keputusan kepada pemerintah setuju untuk bertindak atas wewenang rakyat. adanya konflik kepentingan dan asimetri informasi antara *principal* dan *agent* mendorong *agent* sebagai pemegang mandat dari *principal* untuk melakukan perilaku yang tidak semestinya (*dysfunctional behavior*). untuk mengawasi perilaku *agent* serta menyelaraskan tujuan *principal* dan *agent*, *principal* mewajibkan *agent* untuk mempertanggungjawabkan sumber daya yang dipercayakan kepadanya melalui mekanisme pelaporan keuangan sebagai informasi kinerja *agent* (scott 2003). melalui laporan keuangan yang merupakan tanggung jawab *agent*, *principal* dapat mengukur, menilai sekaligus mengawasi kinerja *agent*, sejauh mana *agent* telah bertindak untuk meningkatkan kesejahteraan *principal*.

### 2.1.2 Teori kontingensi (*contingency theory*)

*contingency theory*, dipelopori oleh *burn* dan *stalker* (otley 1980), dalam penelitian tahun 1950-an di Inggris tentang *task environment*. dalam penelitiannya mengidentifikasi tipe struktur dan praktik manajemen yang tepat untuk berbagai kondisi lingkungan yang berbeda. hasilnya menunjukkan bahwa organisasi yang mekanistik (dengan ciri-ciri: pembagian tugas spesifik dan tegas) tepat untuk lingkungan yang stabil, sedangkan organisasi yang dinamis (dengan ciri-ciri struktur yang fleksibel) tepat untuk lingkungan yang tidak stabil. dalam otley (1980), teori kontingensi didasarkan pada premis bahwa tidak ada sistem yang secara universal selalu tepat diterapkan pada seluruh organisasi pada setiap keadaan, tetapi sistem akuntansi tersebut tergantung pada faktor-faktor situasional dalam organisasi. kesesuaian (*fit*) yang lebih baik antara sistem pengawasan dengan variabel

kontingensi menghasilkan kinerja organisasi yang meningkat. berdasarkan pada *contingency theory*, dapat dikatakan bahwa keberhasilan implementasi sistem akuntansi, pengelolaan keuangan daerah, dan fungsi pengawasan pada bapenda, tergantung pada kondisi bapenda yang bersangkutan.

## **2.2 Implementasi**

Implementasi adalah bermuara pada aktivitas, aksi, tindakan, atau adanya mekanisme suatu sistem. implementasi bukan sekedar aktivitas, tetapi suatu kegiatan yang terencana dan untuk mencapai tujuan kegiatan (Dwijowijoto, 2003).

Menurut Mazmanian dan Sabatier dalam wahab (2004), implementasi adalah pelaksanaan keputusan kebijakan dasar, biasanya dalam bentuk undang-undang, namun dapat pula berbentuk perintah-perintah atau keputusan-keputusan eksekutif yang penting atau keputusan badan peradilan.

## **2.3 Sistem Informasi Akuntansi**

Sistem informasi akuntansi adalah susunan formulir, catatan, peralatan termasuk komputer dan perlengkapannya serta alat komunikasi, tenaga pelaksanaannya dan laporan yang terkoordinasi secara erat yang didesain untuk mentransformasikan dan keuangan menjadi informasi yang dibutuhkan manajemen (Prima 2020).

Kualitas sistem informasi akuntansi yang berkualitas dihasilkan oleh sistem informasi yang mengoptimalkan operasi sistem akuntansinya, karena sistem informasi akuntansi yang berkualitas akan dijadikan manager dalam pengambilan keputusan, perencanaan, dan pengendalian. Untuk mendapatkan informasi yang berkualitas perlu adanya sebuah sistem yang mengolah data menjadi sebuah informasi yang berharga yang mana dituntut adanya informasi yang cepat, tepat dan akurat sehingga mengakibatkan persaingan yang semakin kompetitif (Rizka 2019).

Menurut Romney & Steinbart (2018) mengatakan keenam komponen sistem informasi akuntansi diatas memungkinkan sistem informasi akuntansi untuk memenuhi tiga fungsi bisnis penting, yaitu sebagai berikut :

1. Mengumpulkan dan menyimpan data mengenai kegiatan yang dilakukan organisasi, sumber daya, serta personil dari organisasi. Organisasi memiliki sejumlah proses bisnis, seperti misalnya melakukan penjualan dan pembelian bahan baku dengan proses yang sering dilakukan secara berulang.
2. Mengubah data menjadi informasi sehingga manajemen dapat merencanakan, melaksanakan, mengendalikan, dan mengevaluasi kegiatan, sumber daya, dan personil organisasi.
3. Memberikan pengendalian yang memadai untuk melindungi aset dan data organisasi.

## **2.4 Pengelolaan Keuangan Daerah**

Pengelolaan keuangan daerah dilaksanakan dalam suatu sistem yang terintegrasi yang diwujudkan dalam anggaran daerah (APBD) yang setiap tahun ditetapkan dengan peraturan daerah. Pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan daerah mempunyai kewenangan yaitu menetapkan kebijakan tentang pelaksanaan anggaran daerah, menetapkan kuasa pengguna anggaran dan menetapkan pejabat yang bertugas melakukan pengelolaan utang dan piutang daerah (Annisa 2017)

Di dalam pengelolaan keuangan daerah harus berorientasi pada prinsip-prinsip :

1. *Transparance* (Transparansi), yaitu adanya keterbukaan dari pemerintah daerah dalam proses pembuatan kebijakan mengenai keuangan daerah, dan memberikan kebebasan memperoleh informasi kepada masyarakat berkaitan dengan penggunaan keuangan dalam pembangunan daerah.

2. *Efficient* (Efisien), yaitu setiap pengeluaran anggaran daerah berdasarkan proporsi kebutuhan program dan kegiatan daerah guna menghasilkan *output* atau *income* tanpa mengurangi pelayanan yang optimal kepada publik.
3. *Effective* (Efektif), yaitu dalam implementasi kebijakan keuangan harus tepat guna dan tepat sasaran sesuai kebutuhan masyarakat, serta realisasi anggaran sesuai dengan rencana pembangunan dan habis terpakai.
4. *Accountability* (Akuntabilitas), yaitu kepercayaan dalam pengelolaan keuangan daerah wajib dipertanggung jawabkan kepada semua elemen masyarakat. Secara institusional pertanggung jawaban dilakukan kepada Legislatif (DPRD) sebagai representatif dari masyarakat yang dapat menilai kinerja Eksekutif (PEMDA) dengan menggunakan kriteria dan tolok ukur

yang bersifat komprehensif yang mencakup aspek kebijakan dan penggunaan anggaran.

5. *Participative* (Partisipatif), yaitu adanya peran serta langsung atau tidak langsung dari publik dalam memberikan kajian, koreksi/kritikan, dan masukan yang konstruktif terhadap system pengelolaan keuangan daerah yang profesional dan akuntabel.

Adapun Tujuan utama pengelolaan keuangan pemerintah daerah dapat diringkaskan sebagai berikut :

1. Tanggung jawab  
Pertanggung jawaban (*accountability*) pemerintah daerah harus mempertanggung jawabkan tugas keuangannya kepada lembaga atau orang yang berkepentingan yang sah. Lembaga atau orang itu termasuk pemerintah pusat, dewan perwakilan rakyat daerah (DPRD), kepala daerah (orang yang membawahi semua satuan tata usaha)

dan masyarakat umum. Adapun unsur-unsur penting tanggung jawab mencakup :

- Keabsahan, setiap transaksi keuangan harus berpangkal pada wewenang hukum tertentu.
- Pengawasan, tata cara yang efektif untuk menjaga kekayaan uang dan barang, mencegah pengghamburan dan penyelewengan, dan memastikan semua pendapatan yang sah benar-benar terpungut, jelas sumbernya dan tepat penggunaannya.

## 2. Memenuhi kewajiban keuangan

Keuangan daerah harus di tata sedemikian rupa sehingga mampu melunasi semua ikatan keuangan, jangka pendek dan jangka panjang (termasuk pinjaman jangka panjang).

## 3. Kejujuran

Urusan keuangan harus diserahkan pada pegawai yang jujur, dan kesempatan untuk berbuat curang diperkecil.

## 4. Hasil guna dan daya guna

Tata cara mengurus keuangan daerah harus sedemikian rupa sehingga memungkinkan program dapat direncanakan dan dilaksanakan untuk mencapaitujuan pemerintah daerah dengan biaya serendah-rendahnya dan dalam waktu secepat-cepatnya.

## 5. Pengendalian

Petugas keuangan pemerintah daerah, dewan perwakilan rakyat daerah, dan petugas pengawas harus melakukan pengendalian agar semua tujuan tersebut diatas tercapai; mereka harus mengusahakan agar selalu mendapat informasi yang diperlukan untuk memantau pelaksanaan penerimaan dan pengeluaran dan untk membandingkan penerimaan dan pengeluaran dengan rencana dan sasaran.

## 2.5 Kinerja Pemerintah Daerah

Kinerja pemerintahan daerah dengan sendirinya merupakan seluruh capaian/hasil-

hasil selama pelaksanaan otonomi daerah untuk mencapai tingkat kinerja seperti yang diharapkan tentunya perlu dirumuskan rencana kinerja yang memuat penjabaran sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam rencana strategi pemerintah daerah. Berdasarkan rencana strategi tersebut maka dapat diukur sejauh mana pemerintah daerah telah mampu mencapai sasaran/target (kinerja) yang telah diterapkan baik dengan indikator kuantitatif maupun kualitatif. kinerja dapat digambarkan sebagai fungsi proses dari respon individu terhadap ukuran kinerja yang diharapkan organisasi, yang mencakup desain kerja, proses pemberdayaan, dan pembangunan dari sisi individu itu sendiri yang mencakup keterampilan, kemampuan dan pengetahuan. kinerja merupakan hasil dari suatu proses perpaduan kapabilitas individu dengan sikap individu terhadap aspek pekerjaan dan organisasi (Chici 2017).

Menurut Mohammad (2006), indikator kinerja pemerintah daerah ada beberapa jenis yaitu:

1. Indikator masukan (*input*) adalah segala sesuatu yang dibutuhkan agar pelaksanaan kegiatan dapat berjalan untuk menghasilkan keluaran.
2. Indikator proses (*process*) dalam indikator ini organisasi/instansi merumuskan ukuran kegiatan, baik dari segi kecepatan, ketepatan maupun tingkat akurasi pelaksanaan kegiatan tersebut.
3. Indikator keluaran (*output*) adalah sesuatu yang diharapkan langsung dapat dicapai dari suatu kegiatan yang berupa fisik atau non-fisik.
4. Indikator hasil (*outcomes*) segala sesuatu yang mencerminkan berfungsinya keluaran kegiatan pada jangka menengah (efek langsung).

## 2.6 Hipotesis Penelitian

Berdasarkan latarbelakang dan kerangka pemikiran yang telah diuraikan sebelumnya maka hipotesis penelitian ini sebagai berikut:

### 2.6.1 Pengaruh Implementasi Sistem Akuntansi Terhadap Kinerja Pemerintah Daerah

Bahwa teori agensi menggambarkan hubungan keagenan sebagai hubungan yang timbul karena adanya kontrak yang ditetapkan oleh *principal* (rakyat) yang menggunakan *agent* (pemerintah) untuk melakukan/menyediakan jasa yang menjadi kepentingan rakyat. agar hubungan kontraktual ini dapat berjalan dengan lancar, rakyat mendelegasikan otoritas pembuatan keputusan kepada pemerintah setuju untuk bertindak atas wewenang rakyat.

Penelitian yang dilakukan Hendriksen 2005 implementasi sistem akuntansi pemerintahan, diharapkan mampu menjamin bahwa segala peristiwa penting kegiatan

pemerintah terekam dengan baik dengan ukuran-ukuran yang jelas dan dapat diikhtisarkan melalui proses akuntansi dalam bentuk laporan dimana bisa diperiksa segala transaksi yang terjadi didalam entitas itu, yakni entitas pemerintah adapun sistem akuntansi sangat diperlukan untuk menjamin konsistensi dalam pelaporan keuangan. Oleh sebab itu, peneliti merumuskan hipotesis pertama yang diajukan ialah:

H1: Implementasi sistem akuntansi pemerintahan berpengaruh terhadap kinerja pemerintah daerah

### 2.6.2 Pengaruh Pengelolaan Keuangan Daerah Terhadap Kinerja Pemerintah Daerah.

*Agency theory* menyangkut hubungan kontraktual antara dua pihak yaitu *principal* dan *agent*. *Agency theory* membahas tentang hubungan keagenan dimana suatu pihak tertentu (*principal*) mendelegasikan pekerjaan kepada pihak lain (*agent*) yang melakukan pekerjaan. *Agency Theory* yang

memandang bahwa manajemen perusahaan sebagai agen bagi para pemegang saham, akan bertindak dengan penuh kesadaran bagi kepentingannya sendiri (*self-interest*) bukan sebagai pihak yang arif dan bijaksana serta adil terhadap pemegang saham sebagaimana diasumsikan dalam *stewardship theory* (Solihin, 2008). Teori keagenan berusaha untuk menjawab masalah keagenan yang terjadi antara pihak-pihak yang saling bekerja sama yang memiliki tujuan dan pembagian kerja yang berbeda. Berdasar *Agency theory* pengelolaan pemerintah daerah harus diawasi untuk memastikan bahwa pengelolaan dilakukan dengan penuh kepatuhan kepada berbagai peraturan dan ketentuan yang berlaku. Dengan meningkatnya akuntabilitas pemerintah daerah informasi yang diterima masyarakat menjadi lebih berimbang terhadap pemerintah daerah yang itu artinya *information asymmetry* yang terjadi dapat berkurang. Akuntabilitas kinerja

merupakan perwujudan kewajiban suatu penyelenggara pemerintahan untuk mempertanggung jawabkan keberhasilan maupun kegagalan pelaksanaan pengelolaan keuangan dalam mencapai tujuan dan sasaran *periodic* yang diukur dengan seperangkat indikator kerja. Dalam pengelolaan keuangan daerah yang berorientasi pada kinerja terdapat keterkaitan antara sasaran strategis yang ingin dicapai dalam jumlah dana yang dialokasikan. keterkaitan tersebut dapat memudahkan perencanaan yang bersifat menyeluruh baik dari segi pencapaian sasaran, perumusan dan implementasi program, kegiatan, maupun proses penetapan dan pengendalian anggaran serta analisis kinerja. Oleh sebab itu, peneliti merumuskan hipotesis pertama yang diajukan ialah :

H2: Pengelolaan keuangan daerah berpengaruh terhadap kinerja pemerintah daerah

## **METODE PENELITIAN**

### **3.1 Desain Penelitian**

Pendekatan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif. Pendekatan kuantitatif merupakan metode penelitian ilmiah yang sistematis dengan model-model matematis, teori-teori dan hipotesis yang berkaitan dengan fenomena, baik pada bagian-bagian maupun pada hubungannya.

### **3.2 Lokasi dan waktu penelitian**

Lokasi penelitian ini pada kantor bapenda (badan pendapatan daerah) kota palopo, tepatnya JL. Andi mas jaya, boting, wara, kota palopo. adapun waktu penelitiannya yakni bulan September 2021.

### **3.3 Populasi dan sampel penelitian**

#### **3.3.1 Populasi**

Populasi dalam penelitian ini yaitu pegawai pada kantor Bapenda Kota Palopo sebanyak 50 orang.

#### **3.3.1 Sampel**

Sampel dalam penelitian ini diambil menggunakan sampling jenuh yaitu jumlah sampel sama dengan jumlah populasi yang ada yaitu 50 orang.

### **3.4 Jenis dan Sumber Data**

Jenis dan sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer. Teknik pengumpulan data pada penelitian ini adalah dengan menggunakan kuesioner (angket) yang berisi pertanyaan yang berhubungan dengan objek yang akan diteliti. Peneliti menggunakan kuesioner langsung, dimana kuesioner ini diantar langsung kepada responden.

### **3.5 Instrumen Penelitian**

#### **3.5.1 Uji Asumsi Klasik**

Dalam uji asumsi klasik, penelitian ini menggunakan analisis regresi berganda.

##### **3.5.1.1 Uji Normalitas**

Uji normalitas digunakan untuk menguji apakah nilai residual yang telah

distandarisasi pada model regresi berdistribusi normal atau tidak.

### **3.5.1.2 Uji Heteroskedastisitas**

Heteroskedastisitas berarti ada varian variabel pada model regresi yang tidak sama (konstan). Sebaliknya, jika varian variabel pada model regresi memiliki nilai yang sama (konstan) maka disebut homoskedastisitas. Yang diharapkan pada model regresi adalah yang homoskedastisitas (Suliyanto, 2011).

### **3.5.1.3 Uji Multikolinearitas**

Uji multikolinearitas bertujuan untuk menguji apakah model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel independen.

### **3.5.1.4 Uji Linearitas**

Menurut Suliyanto (2011) uji linearitas dilakukan untuk mengetahui model yang dibuktikan merupakan model linier atau tidak.

## **3.6 Analisis Data**

### **3.6.1 Uji Statistik Deskriptif**

Menurut Grahita Chandrarin (2017) tujuan dari uji statistik deskriptif adalah untuk

menguji dan mendeskripsikan karakteristik sampel yang diobservasi.

### **3.6.2 Uji Kualitas Data**

Pengujian kualitas data dilakukan dengan cara menyebarkan kuesioner, karena data merupakan penggambaran variabel yang diteliti akan digunakan sebagai alat pembuktian hipotesis. Untuk menguji keabsahan jawaban dari responden agar instrumen layak dipakai maka peneliti akan melakukan pengujian berikut ini:

#### **3.6.2.1 Uji Validasi**

Menurut Ghazali (2016), uji validitas digunakan untuk mengukur sah atau valid tidaknya suatu kuesioner. Kuesioner penelitian dikatakan valid jika nilai signifikansi  $< 0,05$ .

#### **3.6.2.2 Uji Reliabilitas**

Reliabilitas menunjuk pada suatu pengertian bahwa sesuatu instrumen cukup dapat dipercaya untuk diinginkan sebagai alat pengumpul data. Uji reliabilitas data pada penelitian akan menggunakan formula

*Cronbach's Alpha*. Suatu variabel dikatakan reliabel jika memberikan nilai *Cronbach's Alpha* > 0,60 (Ghozali, 2016).

### 3.6.3 Analisis Regresi Linear Berganda

Model analisis data yang digunakan dalam model regresi berganda, yaitu model yang digunakan untuk mengetahui seberapa besar pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen. Model persamaan analisis regresi linear berganda pada penelitian ini yaitu:

$$Y = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2$$

Keterangan :

Y = Kinerja pemerintah daerah

a = Konstan (*Intercept*)

b1 = Koefisien Regresi untuk X1

b2 = Koefisien Regresi untuk X2

X1 = Variabel bebas implementasi sistem Akuntansi

X2 = Variabel Bebas Pengelolaan Keuangan Daerah

e = nilai *error*

## 3.7 Uji Hipotesis

### 3.7.1 Uji Statistik T

Kriteria pengujiannya dengan menunjukkan besaran nilai t dan nilai signifikansi p. Jika hasil analisis menunjukkan nilai  $p \leq 0,05$  maka pengaruh variabel independen terhadap satu variabel dependen secara statistik signifikan pada level alfa sebesar 5%.

### 3.7.2 Uji Statistik F

Kriteria pengujiannya dengan menunjukkan besaran nilai F dan nilai signifikansi p. Jika hasil analisis menunjukkan nilai  $P \leq 0,05$  maka model persamaan regresinya signifikan pada level alfa sebesar 5%, sehingga dapat disimpulkan bahwa model yang diformulasikan dalam persamaan regresi linear berganda sudah tepat.

### 3.7.3 Uji Koefisien Determinasi (R<sup>2</sup>)

Uji koefisien determinasi merupakan besaran yang menunjukkan proporsi variasi variabel independen yang mampu menjelaskan variasi variabel dependen.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### 4.1 Deskripsi Data

Responden dalam penelitian ini adalah pegawai yang bekerja pada bapenda Kota Palopo. Pada penelitian ini peneliti mendapatkan data melalui kuesioner yang dibagikan kepada seluruh pegawai di kantor Bapendakotapaloposebanyak 60 kuesioner dan jumlah kuesioner yang diisi dan dikembalikan sebanyak 50 atau tingkat pengambilan data kuesioner sebanyak 90%. Adapun rincian dapat dilihat pada tabel berikut ini:

**Tabel 4.1** Pengumpulan Data Primer Penelitian

N O	Keterangan	Jumlah Kuesioner	Persentase (%)
1	Distribusi Kuesioner	60	100%
2	Kuesioner Kembali	50	90%
3	Kuesioner Cacat/tidak kembali	10	10%

4	Kuesioner yang dapat diolah	50	90%
n = Sampel yang kembali			
Responden rate = $\frac{50}{60} \times 100\%$			
= 90%			

Sumber data : data primer diolah (2021)

### 4.2. Uji Analisis Data

#### 4.2.1 Uji Validitas

Uji validitas digunakan untuk mengukur sah atau valid tidaknya suatu kuesioner. Suatu kuesioner dapat dikatakan valid jika pertanyaan pada kuesioner mampu untuk mengungkapkan sesuatu yang akan diukur kuesioner tersebut. Kuesioner penelitian dikatakan valid jika nilai signifikansi  $< 0,05$ . Kriteria pengujian apabila nilai pearson correlation  $< r$  tabel maka item pernyataan dikatakan tidak valid, sedangkan apabila nilai pearson correlation  $> r$  tabel maka item pernyataan dikatakan valid.

Hasil  $r$  hitung dari 10 pertanyaan (X1), 8 pertanyaan (X2) dan 7 Pertanyaan

(Y) sehingga dalam kuesioner penelitian pada variable independen yaitu Implementasi Sistem Akuntansi (X1), Pengelolaan Keuangan Daerah (X2) dan variable dependen yaitu Kinerja Pemerintah Daerah. , dapat disimpulkan bahwa semua pertanyaan tentang Implementasi Sistem Akuntansi (X1), Pengelolaan Keuangan Daerah (X2) dan Kinerja Pemerintah Daerah (Y) dapat dinyatakan valid karena  $r_{hitung} > r_{table}$ .

#### 4.2.2 Uji Reliabilitas

Suatu kuesioner dapat dikatakan reliabel atau handal apabila jawaban dari responden terhadap pertanyaan adalah konsisten atau stabil dari waktu ke waktu. Dalam menguji reliabilitas data pada penelitian akan menggunakan formula *Cronbach's Alpha*. Suatu variabel dikatakan reliabel jika memberikan nilai *Cronbach's Alpha*  $> 0,60$ .

**Tabel 4.2** Uji Reliabilitas

Variabel	<i>Alpha</i>	Batas	Kete
----------	--------------	-------	------

	<i>Cronba</i> <i>ch's</i>	Reliabil itas	rang an
Implementasi Sistem Akunta nsi (X1)	0,728	0,60	Relia bel
PengelolaanK euangan Daerah (X2)	0,709	0,60	Relia bel
Kinerja Pemerintah Daerah (Y)	0,716	0,60	Relia bel

Sumber data : Lampiran 5, diolah (2021)

Berdasarkan Tabel 4.3 menunjukkan bahwa hasil *Cronbach's Alpha* dari semua variable  $> 0,60$ , sehingga dapat disimpulkan bahwa instrument dari kuesioner penelitian dapat dipercaya sebagai alat ukur dalam menjelaskan Implementasi Sistem Akuntansi (X1), Pengelolaan Keuangan Daerah (X2) dan Kinerja Pemerintah Daerah(Y).

### 4.2.3 Analisis Linear Berganda

Model analisis data yang digunakan dalam model regresi berganda, yaitu model yang digunakan untuk mengetahui seberapa besar pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen. Pada analisis regresi berganda variabel tergantung (terikat) dipengaruhi oleh dua atau lebih variabel bebas sehingga hubungan fungsional antara variabel terikat.

**Tabel 4.3** Analisis Regresi Linear Berganda

#### Coefficients<sup>a</sup>

Model	Unstan		Stand	T	S
	dardize		ardize		
	Coeffici		Coeffi		
	B	Std.	Beta		
		Erro			
		r			
1 (Constant)	.287	1.724		.166	.869

ImplementasiSi	-			-	.5
stemAkuntansi	.064	.095	-.080	.677	0.2
(X1)					
PengelolaanKeu	.954			8.560	.0
angan Daerah		.111	1.017		
(X2)					

a. Dependent Variable: Kinerja Pemerintah Daerah (Y)

Sumber data: Lampiran 6, diolah (2021)

Dari tabel diatas diperoleh nilai konstanta sebesar 0,287 dan nilai koefisien untuk variabel implemntasisistemakuntansi adalah -0,064 dan pengelolaan keuangan daerah sebesar 0,954 maka persamaan regresi diperoleh sebagai berikut:

$$Y = a + b_1X_1 + b_2X_2 + e$$

$$Y = 0,287 + -0,064 X_1 + 0,954 X_2 + e$$

Dari persamaan regresi yang diperoleh, mempunyai arti sebagai berikut:

a. Nilai konstan sebesar 0,287 bernilai positif yang artinya variabel

implementasi system akuntansi dan pengelolaan keuangan daerah bernilai 0 maka variabel kinerja pemerintah daerah mengalami kenaikan sebesar 0,287.

b. Koefisien regresi variabel Implementasi system akuntansi (X1) mengalami kenaikan sebesar satu satuan maka variabel Kinerja pemerintah daerah(Y) akan mengalami penurunan 0,064 dengan asumsi bahwa pengelolaan keuangan daerah (X2) konstan.

c. Koefisien regresi variabel Pengelolaan keuangan daerah (X2) mengalami kenaikan sebesar 0,954 yang artinya jika mengalami kenaikan 1%, maka Kinerja pemerintah daerah(Y) akan mengalami kenaikan 0,954 dengan asumsi bahwa Implementasi system akuntansi (X1) bernilai konstan.

#### 4.4 Uji Hipotesis

##### 4.4.1 Uji Statistik t

**Tabel 4.4** Uji Statistik t

Coefficients <sup>a</sup>						
Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	
	B	Std. Error	Beta			
1	(Constant)	.287	1.724		.166	.869
	Implementasi Sistem Akuntansi (X1)	-.064	.095	-.080	.677	.502
	Pengelolaan Keuangan Daerah (X2)	.954	.111	1.017	8.560	.000

a. Dependent Variable: Kinerja Pemerintah Daerah (Y)

Sumber data: Lampiran 6, diolah (2021)

1. Hipotesis yang pertama diketahui untuk Implementasi Sistem Akuntansi (X1) t hitung =  $-0,677 < t \text{ tabel} = 1,67793$  ditolak Karena lebih kecil  $0,502 > 0,05$  artinya tidak terdapat pengaruh implementasi system akuntansi terhadap kinerja pemerintah daerah sehingga H1 ditolak.

2. Hipotesis yang kedua untuk variabel Pengelolaan Keuangan Daerah (X2) t hitung =  $8,560 > t \text{ tabel} = 1,67793$  dan signifikan  $0,000 < 0,05$  artinya terdapat pengaruh dan signifikan dalam Kinerja Pemerintah Daerah. Sehingga H2 diterima.

#### 4.4.2 Uji Koefisien Determinasi (R<sup>2</sup>)

Uji koefisien determinasi merupakan besaran yang menunjukkan proporsi variasi variabel independen yang mampu menjelaskan variasi variabel dependen. Hasil uji koefisien determinasi (R<sup>2</sup>) dapat dilihat pada tabel berikut.

**Tabel 4.5** Uji Koefisien Determinasi (R<sup>2</sup>)

**Model Summary**

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.944 <sup>a</sup>	0.891	.886	.759

a. Predictors: (Constant), Pengelolaan Keuangan Daerah (X2), Implementasi Sistem Akuntansi (X1)

Sumber data: Lampiran 6, diolah (2021)

Berdasarkan table diatas, diketahui nilai R Square sebesar 0,891 artinya bahwa implementasi system akuntansi dan pengelolaan keuangan daerah memiliki pengaruh sebesar 89,1% dalam kinerja pemerintah daerah sedangkan sisanya 10,9% dipengaruhi oleh variable lain.

#### 4.5 Pembahasan

**Tabel 4.6** Akumulasi Hasil Pengujian Hipotesis

Hipotesis	Signifikan	Hipotesis
H1	0,001	Diterima
H2	0,000	Diterima

Sumber data: Lampiran 6, diolah (2021)

#### **4.5.1 Implementasi sistem akuntansi(X1) berpengaruh dalam kinerja pemerintah daerah(Y)**

Hipotesis pertama (H1) diajukan dalam penelitian ini adalah pengaruh implementasi sistem akuntansi dalam kinerja pemerintah daerah. Berdasarkan hasil regresi linear berganda menunjukkan bahwa implementasi sistem akuntansi berpengaruh positif dan signifikan dalam kinerja pemerintah daerah, sehingga hipotesis pertama diterima. Menurut Rahmasari (2012) implementasi system akuntansi merupakan kemampuan yang harus dimiliki seorang akuntan dalam melaksanakan tugas yang dimandugas tersebut menuntut daya analisis yang tinggi serta proses berpikir yang rasional dalam memecahkan masalah sehingga kinerja yang mereka capai semakin tinggi dan

berpengaruh terhadap sikap kejujuran akuntan. Jika dikaitkan dengan penelitian ini yang menunjukkan bahwa implementasi sistem akuntansi dapat meningkatkan kinerja pemerintah daerah dalam pengelolaan keuangan daerah.

Penelitian ini menjelaskan bahwa implementasi system akuntansi merupakan unsur yang sangat penting dalam kinerja pemerintah daerah. Bisa saja pengelolaan keuangan daerah mendapatkan kesempatan, tekanan, dan rasionalisasi, namun jika tidak memiliki kemampuan maka sulit baginya untuk melakukan kinerja pemerintah daerah dalam pengelolaan keuangan itu sendiri. Dalam penelitian ini implementasi system akuntansi yang dimiliki pegawai di kantor bapenda kota palopo baik sehingga meskipun seorang pegawai memiliki kemampuan untuk melakukan pengelolaan keuangan daerah dengan system akuntansi yang digunakan dengan tepat.

Hasil penelitian ini juga sejalan dengan penelitian yang dilakukan Saraswati(2015) yang menunjukkan bahwa pengaruh implementasi system akuntansi berpengaruh dalam kinerja pemerintah daerah.

#### **4.5.2 Pengelolaan Keuangan Daerah (X2) berpengaruh dalam Kinerja Pemerintah daerah (Y)**

Hipotesis kedua (H2) diajukan dalam penelitian ini adalah pengelolaan keuangan daerah dalam kinerja pemerintah daerah. Berdasarkan hasil regresi linear berganda menunjukkan bahwa pengelolaan keuangan daerah berpengaruh positif dan signifikan dalam kinerja pemerintah daerah. Dengan demikian hipotesis kedua dinyatakan diterima.

Hasil penelitian ini sejalan dengan Priadi (2018) dalam penelitiannya yang menunjukkan pengelolaan keuangan daerah berpengaruh signifikan terhadap kinerja pemerintah daerah. Namun penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian melisa

(2020) dan Andini (2015) yang mengemukakan bahwa pengelolaan keuangan daerah berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kinerja pemerintah daerah.

## **PENUTUP**

### **5.1 Kesimpulan**

Penelitian ini memiliki tujuan untuk mengetahui pengaruh implementasi sistem akuntansi, pengelolaan keuangan daerah terhadap kinerja pemerintah daerah. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Berdasarkan hasil analisis menunjukkan bahwa implementasi sistem akuntansi tidak berpengaruh namun signifikan terhadap kinerja pemerintah daerah.
2. Berdasarkan hasil analisis menunjukkan bahwa pengelolaan keuangan daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja

pemerintah daerah. Hal ini menunjukkan bahwa implementasi sistem akuntansi yang tinggi maka kemampuan kinerja pemerintah daerah yang dimiliki semakin baik.

## 5.2 Saran

1. Pelaksanaan pengukuran yang tidak menghadapkan responden dengan kondisi sebenarnya, maka dikhawatirkan menyebabkan responden menjawab pernyataan survei secara normatif, sehingga hasil penelitian bisa saja menjadi bias dengan kondisi yang ada di lapangan.
2. Pegawai yang bersedia mengisi kuesioner hanya 50 orang. Hal ini dikarenakan sampel dalam penelitian ini yang masih sangat terbatas, proses perizinan yang rumit, kesibukan para responden dan kunjungan para responden dilingkungan luar sehingga proses pengisian kuesioner terhambatan.

## DAFTAR RUJUKAN

- Andi kasfari dan syukriy Abdullah(2019). implementasi sistem akuntansi instansi berbasis Akrual (saiba) pada balai diklat keagamaan provinsi Aceh. *Jurnal ilmiah mahasiswa ekonomi akuntansi (JIMEKA) vol.4, No.2, (2019) 237-244*
- Chici Claraini(2017), Pengaruh Good Governance, Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Dan Gaya Kepemimpinan Terhadap KinerjaPemerintah Daerah (Studi Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Rokan Hilir). *JOM Fekon, Vol.4 No.1 (April) 2017*
- Dito Aditia darma nasution dan junawan (2019). Analisis implementasi sistem akuntansi keuangan daerah pada dinas tenaga kerja dan transmigrasi provinsi Sumatera utara . *Seminar nasional industri dan teknologi (SNIT), politeknik negeri bengkalis*

Dito aditia darma Nasution (2019). analisis pengaruh pengelolaan keuangan daerah, akuntabilitas dan transparansi terhadap kinerja keuangan pemerintah. *Jurnal studi akuntansi & keuangan vol.2 No.3* 149-162

D. R. Novitasari, and T. J. Wahyu Prabowo, "pengaruh pengelolaan keuangan daerah dan pengawasan internal terhadap kinerja pemerintah(Studi Kasus Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kota Semarang)," *Diponegoro Journal of Accounting, vol. 9, no. 2, May. 2020.*

Dodik Slamet Pujiono, hari Sukarno, Novi Puspitasari (2016) pengaruh sistem pengendalian intern terhadap pengelolaan keuangan daerah serta kinerja pemerintah daerah(studi diprovinsi Maluku utara). *Jurnal Bisnis dan Manajemen Vol. 10, No 1 Januari 2016*

Hidayat, Rahmad. (2015 ). Pengaruh Pengelolaan Keuangan Daerah dan

Sistem Akuntansi Keuangan Daerah terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah.(Studi Empiris pada Satuan Kerja Perangkat Daerah di Kabupaten Pada Pariaman). *Jurnal: Akuntansi. Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang.*

Hikmatul, M. Saras. (2016). Pengaruh Pengawasan Intern dan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah (Survey pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kota Bandung). *Jurnal: Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Komputer Indonesia.*

Hikmatul, M. Saras. (2016). Pengaruh Pengawasan Intern dan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah (Survey pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kota Bandung). *Jurnal: Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis UniversitasKomputer Indonesia.*

- Hidayat, Rahmad. (2015 ). Pengaruh Pengelolaan Keuangan Daerah dan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah.(Studi Empiris pada Satuan Kerja Perangkat Daerah di Kabupaten Pada Pariaman). *Jurnal: Akuntansi. Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang.*
- Halim, Abdul. 2007. Akuntansi Sektor Publik : Pengelolaan Keuangan Daerah. *Edisi ketiga. Salemba Empat. Jakarta.*
- Halim,A., dan Rohman. 2008. Pengaruh Peran Manajerial Pengelola Keuangan Daerah dan Fungsi Pengendalian Intern terhadap Kinerja Pemerintah Daerah. *Jurnal Maksi Vol7 No.2. Universitas Diponegoro. Semarang.*
- Halim, A., dan Rohman. 2009. Pengaruh Implementasi Sistem Akuntansi, Pengelolaan Keuangan Daerah Terhadap Fungsi Pengawasan Dan Kinerja Pemerintah Daerah (Survei Pada Pemda Di Jawa Tengah). *Jurnal Akuntansi & Bisnis Vol.9 No.1 ISSN 1412- 0852. Universitas Diponegoro. Semarang*
- Herwiyanti, E., Sukirman, & Aziz, F. S. (2017). Analisis implementasi akuntansi berbasis akrual pada Inspektorat Jenderal Kementerian Keuangan. *Jurnal Akuntansi Dan Keuangan, 19(1), 13–23*
- Indana Sulfah, Sri Wahyuni dan Arina Nurfaza (2019). pengaruh system informasi akuntansi terhadap kualitas laporan keuangan pada skpd kabupaten aceh utara. *Jurnal akuntansi dan pembangunan volume 3 nomor 2 november 2017*
- Ismiarti. (2013). Analisis implementasi sistem pengendalian intern pemerintah, akuntabilitas dan transparansi terhadap kinerja pemerintah(Tesis). *Bengkulu: Program Magister Akuntansi Universitas Bengkulu.*

Linda Lambey, Fanny Jitmau, Lintje Kalangi (2017). Pengaruh Akuntabilitas, Transparansi Dan Fungsi Pemeriksaan Intern Terhadap Kinerja Pemerintah Daerah (Studi Empiris Dikabupaten Sorong). *Jurnal Riset Akuntansi Going Concern Volume 12 Nomor 2, 2017*

Mutmainah, Yuliah, (2013). Pengaruh Sistem Informasi Akuntansi Terhadap Kinerja Keuangan pada Dinas Kesehatan Propinsi Gorontalo. *Jurnal: Akuntansi Universitas Negeri Gorontalo*

Muhammad Azlan, Titiek Herwanti, Endang Pituringsih (2015). Pengaruh kualitas sumber daya manusia, pemanfaatan teknologi informasi, pengendalian intern akuntansi dan pengawasan keuangan daerah terhadap keandalan laporan keuangan daerah pada skpd pemerintah kabupaten Lombok timur. *Jurnal Akuntansi Aktual, Vol. 3, Nomor 2, Juni 2015, hlm. 188–198*

Neo Agustina dan Ahmad Saifanur (2020). Pengaruh implementasi sistem akuntansi, pengelolaan keuangan daerah dan pengawasan internal terhadap Kinerja pemerintah kabupaten Aceh utara. *Jurnal akuntansi dan pembangunan volume 5 nomor 3 November 2019*

Novtania Mokoginta, Linda Lambey dan Winston Pontoh (2017). Pengaruh sistem pengendalian intern dan sistem akuntansi keuangan daerah terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah. *Jurnal Riset Akuntansi Going Concern volume 12 nomor 2, 2017, 874-890*

Novian Wira Putra Dan Argo Putra Prima (2020). Evaluasi penerapan sistem pengendalian intern untuk persediaan barang pada PT. Jaya Wasantara kota Batam. *volume 3, Nomor 3, September 2020.*

Nasution, D. A. D. (2016). Analisis faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi SAP berbasis aktual

- dengan komitmen SKPD sebagai variabel moderating pada provinsi Sumatera utara (Tesis).*Medan:Universitas Sumatera Utara.*
- Putra, Nopriansyah.(2016). Pengaruh Pengelolaan Keuangan Daerah, Akuntabilitas dan Transparansi Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah dengan Pengawasan Sebagai Variabel Moderating pada Provinsi Sumatera Utara. *Jurnal Ekonom, Vol 19, No 4, Oktober 2016.*
- Pasaribu,F. J. (2011). Pengaruh penyajian laporan keuangan SKPD dan aksesibilitas laporan keuangan SKPD terhadap transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan SKPD(Tesis).*Medan:Program Pasca SarjanaUniversitas Sumatera Utara.*
- Ratna Dian Fatmawati Dan Yayuk Sri Rahayu (2018) Analisis Pengaruh Experiential Marketing Terhadap Loyalitas Melalui Kepuasan Nasabah Sebagai Variabel Intervening (Studi Pada PT BRI Syariah Cabang Malang). *jurnal Manajemen, Akuntansi dan Perbankan november 2018.*
- Rosalia., & Kawedar, W (2017) Implementasi pelaporan keuangan berbasis akrual pada perguruan tinggi negeri badan hukum: analisis deskriptif kualitatif. *Diponegoro journal of accounting. 6 (3), 1-12*
- Republik Indonesia,Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah .Republik Indonesia, Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah.
- Siska Yulia Defitri(2017). Pengaruh pengelolaan keuangan daerah dan system akuntansi keuangan daerah terhadap kualitas laporan keuangan

pemerintah daerah. *Jurnal Benefita*3(1)

*Februari 2018 (64-75)*

Syarifudin, Yan S.H. (2010) Pelaksanaan Sistem Pengendalian Internal Untuk Mewujudkan Pengelolaan Keuangan Daerah Yang Efektif, Efisien Dan Bebas Korupsi. *Jurnal Univertas Tanjung Pura*. Vol 3 No.5 (2013). ISSN 0216/2091.